

Tingkat Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut

Hairi Firmansyah

Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian
Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Ahmad Yani km.36 Banjarbaru 70714, Kalimantan Selatan

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the achievement of empowerment indicators (degree and empowerment bases) of community empowerment programs. This study was a survey research with quantitative research approaches. The respondents, consist of 60 people, were taken with multistage sample random sampling techniques (simple random stratified). The samples were subjected to community members or beneficiaries of community empowerment programs undertaken in the Banjarmasin City and Tanah Laut District. The results showed that the level of community empowerment at the Urban Poverty Program (P2KP), which was conducted in Banjarmasin City, could not afford the empower its targeted communities or beneficiaries, so the program could not deserve to be called as the community empowerment program. Similarly, the National Program for Community Self-Empowerment – Sub-districts Program Development (PNPM-PPK) that held in the Tanah Laut District was also unable to empower its targeted communities or beneficiaries, so it could not deserve to be called as a community empowerment program. Group dynamics and the role of facilitators were the factors that affect the empowerment.

Keywords: Level of community empowerment, the degree of empowerment, empowerment bases, Group Dynamics, Facilitator.

Pendahuluan

Pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan selama ini belum pernah memuaskan. Pengurangan jumlah penduduk miskin tidak signifikan

peningkatan anggaran yang disediakan (Lampiran 1). Ketidakpuasan ini kian mengganggu, karena ada hasil amatan tentang makin fenomenalnya penduduk/keluarga yang “miskin-kembali.”

Munculnya gejala “miskin-kembali” menguatkan beberapa dugaan yang selama ini berkembang, seperti misalnya, program mulya tersebut terperangkap dalam logika “proyek” yang mementingkan kerapian pertanggungjawaban administratif (*administrative accountability*), yakni seberapa besar anggaran yang disediakan dan seberapa banyak kegiatan atau program dilaksanakan, daripada pertanggungjawaban sosialnya, yakni seberapa besar perubahan positif yang signifikan terjadi secara berkelanjutan pada kelompok sasaran.

Semua program pemberdayaan atau penanggulangan kemiskinan di negeri ini, baik yang diprakarsai oleh Pemerintah Pusat maupun yang bermitra dengan Pemerintah Daerah, menerapkan konsep pemberdayaan. Tetapi sampai sekarang tidak ada data statistik yang melaporkan tentang peningkatan dan sustainabilitas keberdayaan penduduk/masyarakat setelah program-program itu dilaksanakan.

Laporan-laporan resmi tentang perkembangan jumlah penduduk miskin menguatkan penilaian bahwa yang *sustainable* adalah programnya, bukan tingkat keberdayaan kelompok sasaran. Karena itu, terbentuknya mentalitas *self-help* yang hendak diwujudkan menjadi tidak tercapai. Sebaliknya, sustainabilitas program justru menggambarkan terjadinya mentalitas *help-me*. Berdasarkan rasionalisasi ini patut dipersoalkan, apakah masih layak program-program tersebut menyandang

konsep pemberdayaan? Kalau *toch* juga diklaim telah mewujudkan pemberdayaan, sampai setinggi apa derajat pemberdayaan keberdayaan dicapai dan dengan basis keberdayaan sekuat apa?

Penelitian ini mengkaji persoalan-persoalan di atas dengan fokus analisis pada dua masalah. *Pertama*, apakah program-program tersebut mampu mencapai indikator-indikator pemberdayaan yang diidealkan secara konseptual dalam teori pemberdayaan masyarakat? Jika ya, maka program-program itu masih layak disebut sebagai program pemberdayaan.

Kedua, faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan untuk dikaitkan dengan tercapai-tidaknya indikator-indikator keberdayaan (derajat dan basis keberdayaan) tersebut?

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis ketercapaian indikator-indikator keberdayaan (derajat dan basis keberdayaan) dari program-program pemberdayaan masyarakat tersebut.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat dikaitkan dengan tercapai-tidaknya indikator-indikator keberdayaan dimaksud.

Tinjauan Pustaka

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan yang merangkum multi-aspek. Konsep ini mewakili paradigma baru pembangunan (*post-developmentalism paradigm*), yang bersifat *people centred, participatory, empowering, and sustainable*" (Chambers, 1995).

Paradigma pemberdayaan masyarakat lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety need*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman (1992) disebut sebagai *alternative development*, yang menghendaki *inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*" (Kartasmita, 1997). Intinya adalah *agency, self-determination*, dan *self-help* dengan basis sustainability.

Menurut Sumodiningrat (2002), upaya memberdayakan masyarakat harus dilihat dari tiga sisi. *Pertama*, upaya itu harus mampu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang

(*enabling*). *Kedua*, ia harus memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). *Ketiga*, ia juga mengandung pula arti melindungi.

Menurut Ife (2002), program pemberdayaan masyarakat hanya mungkin dapat mewujudkan indikator-indikator keberdayaan bila ia dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan, seperti prinsip holisme, keberlanjutan, keanekaragaman, perkembangan organik, perkembangan yang seimbang, dan mengatasi struktur yang merugikan. Prinsip-prinsip inilah yang bila diterapkan secara konsekuen akan menjadikan program pemberdayaan tersebut sebagai pemberdayaan masyarakat yang mampu memberdayakan masyarakat

Kajian-kajian konseptual tentang pemberdayaan menyajikan banyak indikator keberdayaan. Empat di antaranya menyangkut derajat keberdayaan (Soeharto, 2008), yakni:

- a. Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (*power to*).
- b. Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (*power within*).
- c. Tingkat kemampuan menghadapi hambatan (*power over*).
- d. Tingkat kemampuan kerjasama dan solidaritas (*power with*).

Sedangkan lima yang lainnya berkaitan dengan basis keberdayaan (Friedman, 1992), yakni:

- a. Pengembangan berbasis masyarakat.
- b. Keberlanjutan
- c. Partisipasi masyarakat
- d. Pengembangan modal sosial masyarakat.
- e. Penghapusan ketimpangan gender.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut membutuhkan *facilitating factors*, yakni kelompok masyarakat yang dinamis (*group dynamics*) dan pendamping/fasilitator yang kompeten. Meskipun *facilitating factors* tidak diverifikasi secara empiris, tetapi perlu dikemukakan agar sifat dasar dari setiap program pemberdayaan masyarakat – senantiasa membutuhkan pihak luar (fasilitator) dan kedinamisan kelompok sosial – dapat ditonjolkan. Rangkain teoretisasi di atas membentuk sebuah kerangka pemikiran penelitian seperti disajikan pada Lampiran 2.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian tersebut, penelitian merumuskan dua hipotesis, sebagai berikut:

- a. Program-program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah selama itu diduga kuat tidak optimal memberdayakan masyarakat, dan karena itu tidak layak

disebut program pemberdayaan masyarakat.

- b. Dinamika kelompok masyarakat dan kualitas pendamping diduga kuat menentukan tingkat keberdayaan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian survei dan studi pustaka. Penggunaan metode survei ditujukan untuk mempresentasikan fenomena yang diteliti dengan mengandalkan data cuplikan atau studi sampel yang digunakan. Populasi penelitian ini adalah seluruh sasaran program P2KP dan PNPM-PPK di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut.

Metode pengambilan *sampel* menggunakan teknik *multistage sample random sampling* (acak sederhana bertingkat) dimulai dari pemilihan Kecamatan pelaksana program, Kelurahan atau Desa pelaksana program, kelompok pelaksana program dan yang terakhir individu pelaksana program. Jumlah sampel yang diambil 60 orang dengan masing-masing program berjumlah 30 orang. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut. Kota Banjarmasin dipilih secara purposive, karena kota ini merupakan salah satu daerah pelaksana program P2KP yang sarannya paling banyak. Sedangkan Kabupaten Tanah Laut dipilih karena Kabupaten ini di

adalah pelaksana program PNPM-PPK terbaik tahun 2008.

Sebagai penelitian survey, penelitian ini mengandalkan kuesioner sebagai instrumen utama. Instrumen ini disusun berdasarkan kajian pustaka tentang indikator-indikator keberdayaan.

Pengkajian masalah penelitian ini membutuhkan peubah-peubah penelitian, yang disusun berdasarkan kajian pustaka tentang pemberdayaan masyarakat. Secara umum, peubah penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga peubah, yaitu:

- a. Tingkat keberdayaan, yang terdiri atas dua indikator, yaitu (a) derajat keberdayaan; (b) basis keberdayaan
- b. Dinamika kelompok.
- c. Kemampuan fasilitator.

Dua peubah terakhir tidak dielaborasi lebih jauh, karena hanya diverifikasi secara logis. Analisis data dalam penelitian menerapkan dua pendekatan. Untuk masalah penelitian pertama diterapkan analisis kuantitatif dengan bantuan statistik deskriptif (rata-rata, median, dan indeks). Sedangkan untuk masalah penelitian kedua diterapkan analisis logis.

Hasil Penelitian

Derajat keberdayaan Masyarakat

Indikator derajat keberdayaan masyarakat tingkat dan tingkatan keberdayaan sebagai akibat langsung dan tidak langsung program pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menetapkan empat parameter derajat keberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (*power within*).
- b. Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (*power to*).
- c. Tingkat kemampuan menghadapi hambatan (*power over*).
- d. Tingkat kemampuan membangun kerjasama dan solidaritas (*power with*).

Secara konseptual, empat parameter ini tersusun secara gradual; parameter *power with* merupakan parameter paling tinggi tingkatannya dibandingkan dengan tiga parameter lainnya.

Konsep pemberdayaan masyarakat menetapkan kaidah bahwa program pemberdayaan masyarakat baru bisa dianggap berhasil ketika ia mampu mewujudkan *power with* pada kelompok sasaran. Namun demikian, parameter-parameter lainnya – meskipun tingkatannya lebih rendah – dianggap sebagai *entry-point* untuk mewujudkan

power with. Parameter ini menggambarkan kondisi ketika kelompok sasaran pemberdayaan mampu mengembangkan potensi keberdayaannya sendiri (parameter 1 – 3), tetapi juga mampu memberdayakan orang/keluarga lain di komunitasnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat di Kota Banjarmasin belum mampu mengoptimalkan potensi *power with* (indeksnya di bawah 50%) kelompok sasaran, meskipun sudah cukup optimal meningkatkan tiga parameter di bawahnya (Lampiran 2). Grafik ini menunjukkan, Indeks Derajat Keberdayaan Masyarakat (IDK) pada parameter kesadaran dan keinginan untuk berubah (*power to*) baru mencapai 59,95%, sedikit lebih tinggi dari ambang batas IDK minimal (50%). Demikian juga dengan parameter lainnya.

Kasus di Kabupaten Tanah Laut hampir sama. Lampiran 3 menunjukkan, program-program pemberdayaan masyarakat di kabupaten ini gagal mewujudkan tingkatan keberdayaan tertinggi. Indeksnya sedikit lebih besar daripada kasus di Kota Banjarmasin, tetapi masih di bawah ambang batas minimal (50%).

Temuan-temuan penelitian ini menggambarkan bahwa program-program pemberdayaan masyarakat selama ini belum mampu mengoptimalkan derajat keberdayaan masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga

tingkatan yang paling tinggi dari pemberdayaan masyarakat (*power with*) tidak tercapai. Berdasarkan pada temuan ini dapat dikemukakan, program-program pemberdayaan masyarakat yang selama ini dilaksanakan tidak layak disebut sebagai program pemberdayaan masyarakat, seperti yang diduga dalam hipotesis penelitian ini.

Basis Keberdayaan Masyarakat

Kalau derajat keberdayaan menggambarkan ketercapaian tingkat dan tingkatan keberdayaan, maka basis keberdayaan menggambarkan jaminan keberlanjutan derajat keberdayaan yang sudah diwujudkan (bukan programnya yang *sustainable*, tetapi dampak positif/perubahan positif pada kelompok sasaran). Penelitian ini menetapkan lima parameter basis keberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Pengembangan berbasis masyarakat.
- b. Keberlanjutan.
- c. Partisipasi masyarakat.
- d. Pengembangan modal sosial masyarakat.
- e. Penghapusan ketimpangan gender.

Hasil penelitian ini menunjukkan (Lampiran 4), dari lima parameter basis keberdayaan hanya satu basis keberdayaan yang sedikit lebih tinggi dari ambang batas minimal (50%), yakni tingkat partisipasi penduduk.

Kasus di Kabupaten Tanah Laut lebih daripada kasus di Kota Banjarmasin. Setidak-tidaknya, parameter pengembangan sumberdaya berbasis masyarakat – selain partisipasi penduduk -- sudah mulai tergarap, meskipun program ini belum mampu merintis keberlanjutan manfaat/keberdayaan, modal sosial, dan ketimpangan gender (Lampiran 5).

Temuan-temuan ini menggambarkan bahwa program pemberdayaan masyarakat paling mudah "menggarap" partisipasi penduduk dan mulai mampu merintis pengembangan sumberdaya lokal, tetapi tidak mampu memelihara modal sosial dan mengatasi ketimpangan gender untuk keberlanjutan manfaatnya.

Dari indikator ini program-program pemberdayaan masyarakat juga dapat dinilai belum layak disebut program pemberdayaan masyarakat, seperti diduga kuat oleh hipotesis penelitian ini. Prinsip-prinsip yang seharusnya mendasari pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat masih diabaikan.

Tingkat Keberdayaan Masyarakat Komposit

Seperti dikemukakan di atas, tingkat keberdayaan masyarakat merupakan gabungan antara derajat keberdayaan dan basis keberdayaan. Bagian ini mendeskripsikan indeks gabungan untuk kasus di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut.

Lampiran 6 menunjukkan variasi tingkat ketercapaian derajat dan basis keberdayaan. Secara kumulatif, indeks tingkat keberdayaan masyarakat pada semua program pemberdayaan masyarakat di Kota Banjarmasin mencapai 44,04% (berada di bawah ambang batas minimal). Dengan demikian, baik berdasarkan indeks tunggal maupun kumulatif, program-program pemberdayaan masyarakat tidak layak disebut program pemberdayaan.

Gambaran yang sama juga ditemukan pada kasus di Kabupaten Tanah Laut, meskipun agak lebih baik daripada kasus di Kota Banjarmasin (perhatikan garis hijau dalam gambar). Secara komulatif, indeks komposit tingkat keberdayaan masyarakat di kabupaten ini juga di bawah ambang batas minimal, yakni 48,17%. Dengan demikian, kesimpulan pada indeks tunggal di atas dikuatkan oleh kesimpulan pada indeks komposit. Dengan kata lain, baik pada indeks tunggal maupun komposit, program-program pemberdayaan di kabupaten ini juga tidak optimal memberdayakan masyarakat. Dan karena itu pula, program-program ini tidak layak disebut sebagai program pemberdayaan, seperti diduga dalam hipotesis penelitian ini.

Faktor-Faktor Keberdayaan Masyarakat

Salah satu keterbatasan penelitian ini adalah tidak melakukan verifikasi empiris terhadap faktor-

faktor penentu keberdayaan masyarakat, yakni dinamika kelompok dan peran fasilitator. Karena itu, analisis terhadap faktor-faktor ini dilakukan secara logis (pendekatan *logico*), yakni dengan cara melakukan kajian pustaka yang menjelaskan tentang begitu besarnya peran dinamika kelompok dan peran fasilitator dalam mewujudkan keberdayaan kelompok.

Tentang peran dinamika kelompok, Hasil penelitian Subiyantoro (2007) menunjukkan, salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan program Gardu-Taskin di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur adalah dukungan kelompok masyarakat sebagai tempat penyaluran dana bantuan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan program Gardu-Taskin oleh masyarakat sasaran program. Penilaian keberhasilan pelaksanaan program Gardu-Taskin pun dilakukan secara berkelompok sesuai dengan rencana kegiatan yang direncanakan dan kelancaran penggalangan dana bantuan.

Hasil penelitian Utomo (2011) menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Program PNPM Mandiri Pedesaan di desa Gudang Hirang Kabupaten Banjar adalah peran kelembagaan atau kelompok sasaran program (KSP) yang efektif.

Faktor-faktor dinamika kelompok yang perlu dikembangkan agar kelompok sosial mampu

memfasilitasi tercapainya tingkat keberdayaan program pemberdayaan, Beal *et al* (1962), Cartwright dan Zender (1968) dan Slamet (1978) dalam FX. Soebiyanto (1998) dapat dilihat pada Lampiran 8.

Tentang peran fasilitator, penelitian Subiyantoro (2007) menyimpulkan bahwa faktor lain yang mempengaruhi kesuksesan program Gardu-Taskin di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur adalah peran fasilitator yang mau dan mampu membantu masyarakat sampai program berakhir walaupun sudah habis kontak sebagai pendamping atau fasilitator. Utomo (2011) juga mengemukakan bahwa fasilitator atau pendamping adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan Program PNPM mandiri Pedesaan di Desa Gudang Hirang, Kab. Banjar, gagal tidaknya pelaksanaan program tergantung pada kecakapan dan keuletan fasilitator dalam mendampingi sasaran program dalam rangka mendorong dan memampukan masyarakat agar berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan pendekatan *logico* di atas dapat dikemukakan bahwa dinamika kelompok dan peran fasilitator merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberdayaan masyarakat dalam program pemberdayaan. Sangat bisa jadi, ketidakefektifan program-program pemberdayaan masyarakat mewujudkan keberdayaan masyarakat di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut disebabkan oleh rendahnya

dinamika kelompok masyarakat dan kualitas pendamping atau fasilitator

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan di Kota Banjarmasin dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri-Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) di Kabupaten Tanah Laut belum mampu memberdayakan masyarakat sasarnya dan tidak layak disebut sebagai program pemberdayaan masyarakat.
2. Faktor dinamika kelompok dan fasilitator atau pendamping program pemberdayaan sangat menentukan tingkat keberdayaan masyarakat sasaran program

Saran

- a. Perlunya penerapan program-program pemberdayaan masyarakat yang murni oleh Pemerintah yang menerapkan konsep pemberdayaan dan indikator-indikator keberdayaan masyarakat tanpa disederhanakan.
- b. Perlunya pembenaran penilaian keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dari sisi manfaat dan perubahan positif yang ditunjukkan sasaran program

dan bukan pada banyaknya kegiatan yang dilaksanakan dan besarnya dana dianggarkan.

- c. Perlunya penguatan faktor-faktor penentu keberdayaan masyarakat seperti kelompok sasaran dan pendamping.
- d. Perlunya penelitian serius tentang pengaruh dinamika kelompok dan peran fasilitator terhadap tingkat ketercapaian keberdayaan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Babbie, E. 1992. *The Practice Of Social Research*. Wadsworth Publishing. California. USA
- Soebiyanto, FX., 1998, Peran Kelompok Dalam Mengembangkan Kemandirian Petani dan Ketangguhan Berusah. IPB. Bogor
- _____, 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Refika Aditama, Bandung.
- Ife, J. 2008. *Community Development*. Terjemahan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Kartasasmita, G. 1997. *Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia*, LP3ES, Jakarta
- Sarman, M. 2004, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial*,

Pustaka FISIP UNLAM,
Banjarmasin

Singarimbun, M. dan S. Effendi.
1989. Metode Penelitian
Survei. LP3ES (Edisi Revisi),
Jakarta.

Subiyantoro. 2007. Peran
Pemerintah Daerah di Era
otonomi daerah dalam
Pengentasan Kemiskinan
(Studi Kasus Program
Gerbang Mas-Taskin
Kabupaten Lumajang Jawa
Timur). UNIBRAW. Malang

Suharto, Edi, 2006, Analisis
Kebijakan Publik : Panduan
Praktis Mengkaji Masalah
dan Kebijakan Sosial,
Alfabeta, Bandung

Sumodiningrat, Gunawan, 1998.
Membangun Perekonomian
Rakyat. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.

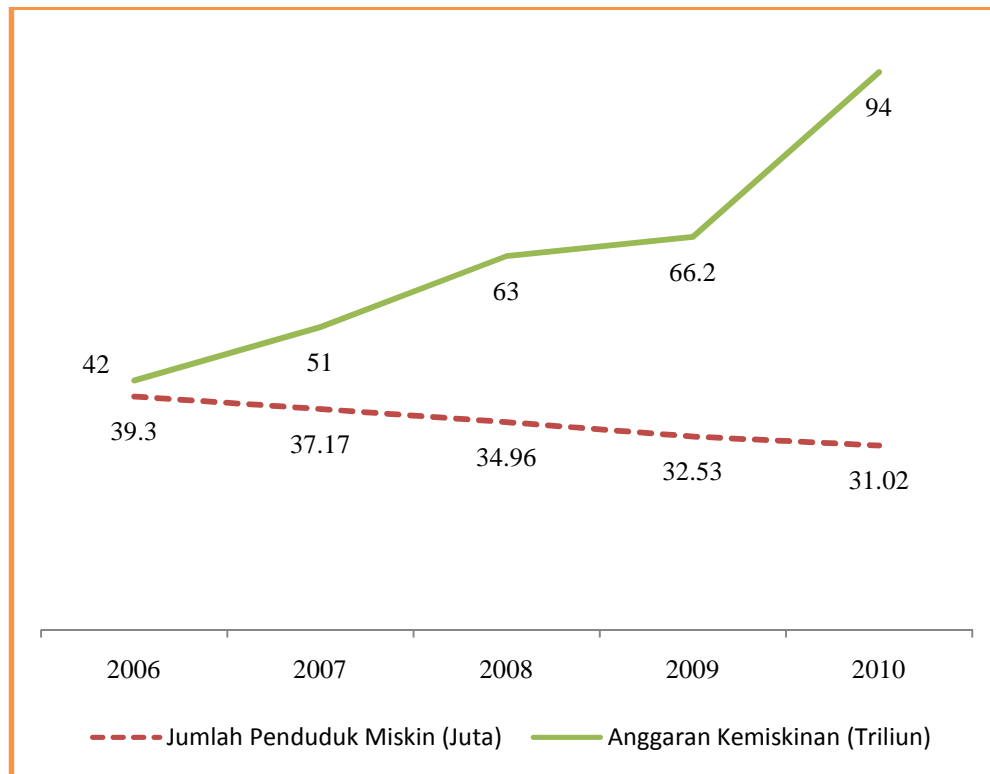
Syakrani, 2011, Memajukan
Kesejahteraan bagi
semua”Perspektif
Pemberdayaan Masyarakat”.
FISIP Unlam. Banjarmasin.

Utomo, Hadi, 2011. Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat
Pedesaan (Studi Kasus
pelaksanaan Program PNPM
Mandiri Pedesaan di desa
Gudang Hiranng Kab. Banjar).
MSAP UNLAM. Banjarbaru

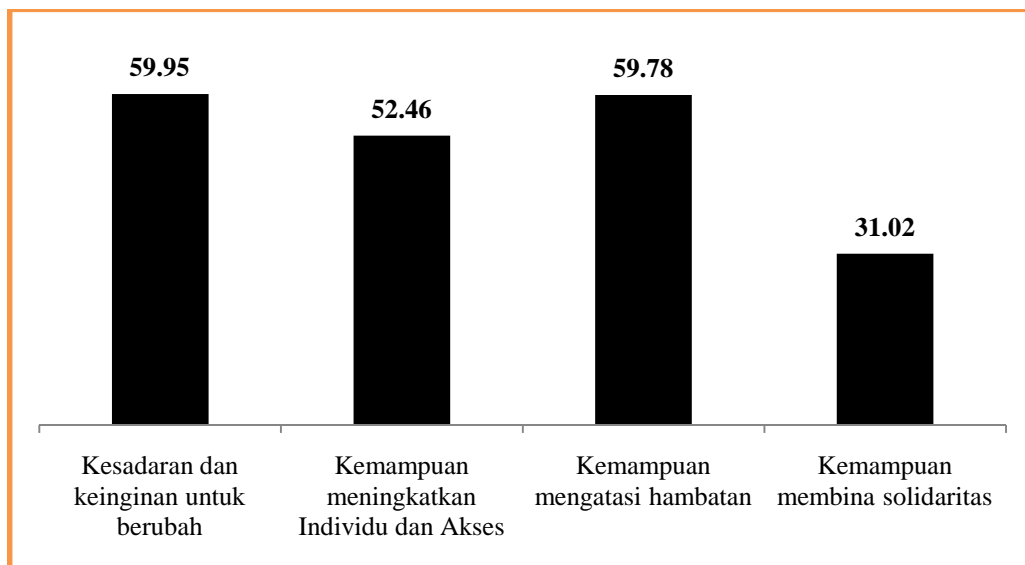
Wrihatnolo, Randy R. dan Riant
Nugroho Dwidjowijoto, 2007,
Manajemen Pemberdayaan :
Sebuah Pengantar dan
Panduan untuk
Pemberdayaan Masyarakat,
Elex Media Komputindo
Kelompok Gramedia,
Jakarta.

Lampiran

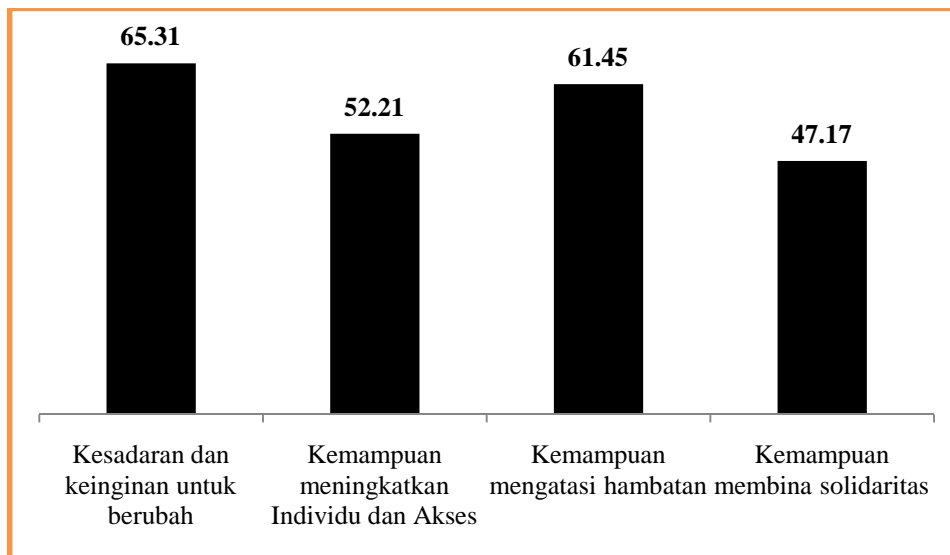
Lampiran 1. Perbandingan antara Anggaran Kemiskinan (triliun) & Penurunan Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) tahun 2006 - 2010



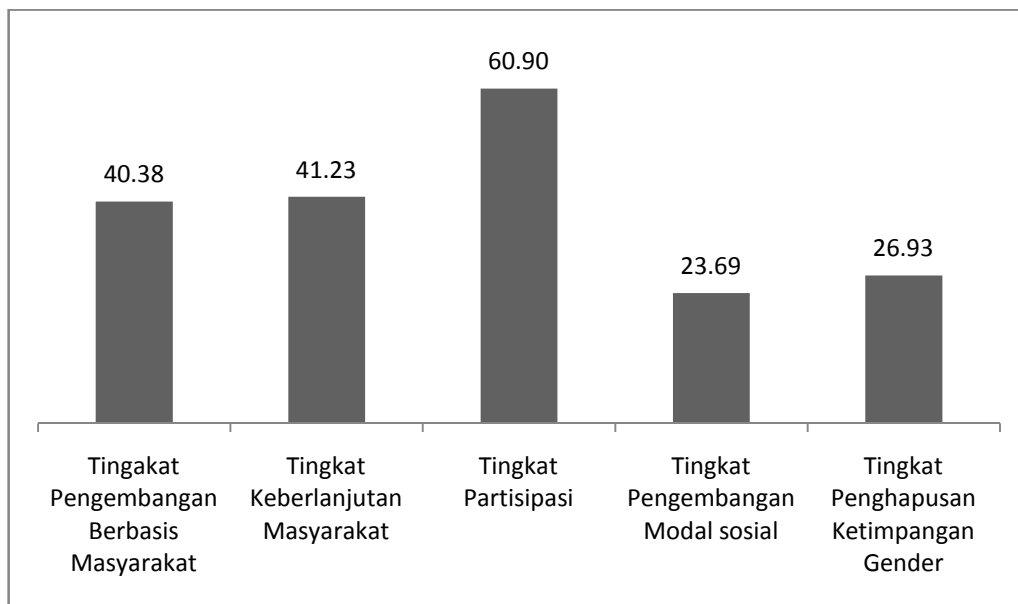
Lampiran 2. Indeks Derajat Keberdayaan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kota Banjarmasin



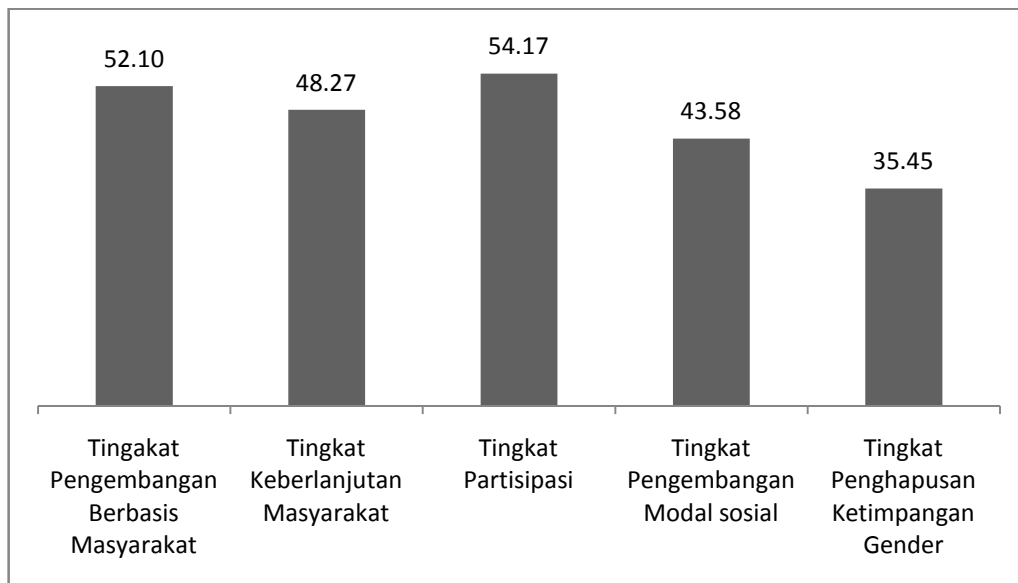
Lampiran 3. Indeks Derajat Keberdayaan Masyarakat dalam PNPM-PPK di Kabupaten Tanah Laut



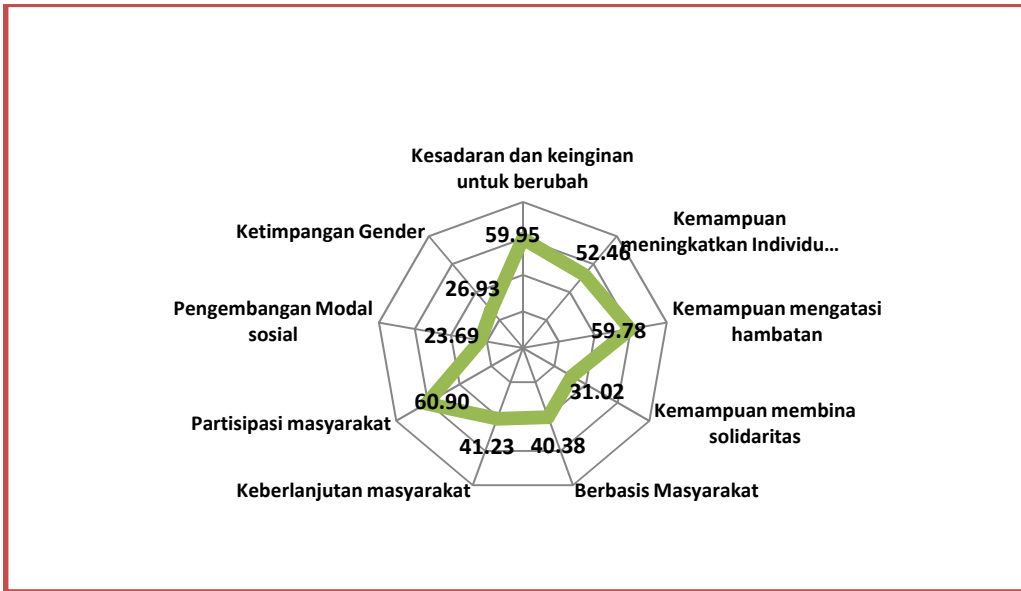
Lampiran 4. Indeks Derajat Keberdayaan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kota Banjarmasin



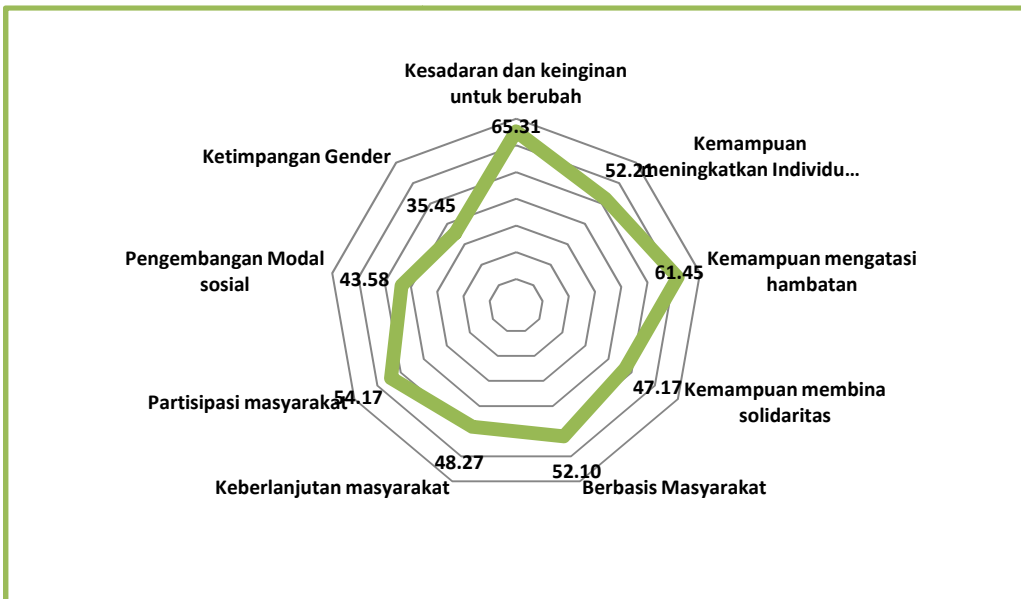
Lampiran 5. Indeks Basis Keberdayaan Masyarakat dalam PNPM-PPK di Kabupaten Tanah Laut



Lampiran 6. Indeks Komposit Tingkat Keberdayaan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kota Banjarmasin



Lampiran 7. Indeks Komposit Tingkat Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan di Kabupaten Tanah Laut



Lampiran 8. Perbandingan dinamika kelompok hasil penelitian dan dinamika kelompok yang dikemukakan para ahli yang seharusnya ada dalam sebuah kelompok

Unsur Kelompok	Hasil Penelitian (perspektif pelaksana program)	Dinamika Kelompok Seharusnya Menurut Para Ahli (perspektif sasaran program)
Tujuan kelompok	Tempat penyaluran dana, merencanakan kegiatan dan penyusunan pelaporan kegiatan	Tujuan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang membantu anggota kelompoknya berdaya
Struktur	Tidak tergambar secara jelas	Harus tergambar : Posisi dan Jabatannya untuk membantu anggota kelompoknya berdaya
Fungsi dan peran	Tidak tergambar secara jelas	Harus sesuai Tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk membantu anggota kelompoknya berdaya
Kekompakan	Tidak tergambar secara jelas	Kompak selalu di bina sebagai satu kesatuan untuk membantu anggota kelompoknya berdaya
Suasana	Tidak tergambar secara jelas	Dijaga agar selalu kondusif untuk melakukan kegiatan untuk membantu anggota kelompoknya berdaya
Tekanan	Tidak tergambar secara jelas	Harus ada tekanan untuk peningkatan kinerja kelompok untuk membantu anggota kelompoknya berdaya
Efektivitas	Efektivitas kelompok disebutkan tetapi tidak tergambar efektivitas dalam bentuk apa?	Harus memiliki efektifitas yang tinggi untuk membantu anggota kelompoknya berdaya

Sumber: Beal *et al.* (1962), Cartwright dan Zender (1968) dan Slamet (1978) dalam Soebiyanto (1998)